

## Evaluasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Rumah Padat Karya di Gubeng Surabaya

**Mulus Sugiarto, Ismi Azizah**  
email: [mulussugiarto@uwp.ac.id](mailto:mulussugiarto@uwp.ac.id)  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Wijaya Putra

### *Abstract*

*Poverty is a multidimensional problem related to the inability to access economic, sociocultural, political, and participation in society. Poverty is also one of the problems faced by people in urban areas, until now the problem of poverty has not been resolved. The government has tried to overcome this problem through the Urban Poverty Reduction Program (PPKP), with one of its programs through the Urban Labor Intensive Program (PKP). This research uses qualitative research with a descriptive approach, using public policy evaluation dimension criteria to evaluate the implementation of the Viaduct by the Gubeng Labor-Intensive House Program according to William Dunn. This study aims to evaluate and determine the supporting and inhibiting factors for implementing the Labor Intensive program through Viaduct by Gubeng in Gubeng District, Surabaya City. The efficiency of the evaluation of the Viaduct by Gubeng Labor-Intensive House Program cannot be said to be efficient because the Surabaya City Government's efforts to finance the Viaduct by Gubeng until it can stand as it is now have not completely alleviated poverty in Gubeng District. Suggestions can be given that can later improve or improve the activities of the Viaduct by Gubeng Labor Intensive Policy Program: 1. It is necessary to implement a work package program whose training is more specific to Labor-Intensive programs such as one of them is Viaduct by Gubeng 2. The Surabaya City Government must focus more on the talents and interests of the people of Gubeng District.*

**Keywords:** *Evaluation of the Labor-Intensive House Policy Process, Policy, Labor Intensive House*

### **PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam Masyarakat (Nurwati, 2020). Kemiskinan juga merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat di wilayah perkotaan hingga saat ini permasalahan kemiskinan belum bisa diselesaikan. Pemerintah sudah berupaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut melalui Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PPKP), dengan salah satu programnya melalui Program Padat Karya Perkotaan (PKP).

Menurut Mardikanto dalam Jamaluddin, dkk (2018:24) Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengangkat harkat dan martabat lapisan masyarakat yang tidak dapat lepas dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Ini berhipotesis bahwa ada hubungan antara pemberdayaan masyarakat dan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat banyak dipilih sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah, termasuk pengentasan kemiskinan. Dengan memberdayakan Masyarakat diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan yang ada di seluruh wilayah Indonesia termasuk kota Surabaya yang banyak melahirkan program pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan penduduk kota dari Surabaya.

Program padat karya dilaksanakan tidak hanya menyasar masyarakat miskin yang tinggal di rumah susun tetapi juga masyarakat miskin yang tinggal di Surabaya. Padat karya merupakan salah satu realisasi dari konsep pengentasan kemiskinan yang dirancang untuk mengikutsertakan MBR (Masyarakat

Berpenghasilan Rendah) yang sekarang berganti nama menjadi GAMIS (Keluarga Miskin).

Bulan Maret 2022 ditetapkan sebagai Bulan Padat Karya di Surabaya. Penetapan tersebut bertujuan menggerakkan kembali roda perekonomian Kota Pahlawan, yang selama pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Program padat karya tersebut diharapkan bisa menggerakkan ekonomi secara lebih masif, berujung pada penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan. (Slamet Hadi Purnomo, 2022).

Ada tiga strategi untuk mengoptimalkan program padat karya di Surabaya. (Slamet Hadi Purnomo, 2022). Pertama, padat karya berbasis usaha mikro kecil menengah (UMKM), termasuk di dalamnya para pedagang kaki lima (PKL). Strategi kedua adalah mengoptimalkan dan mempercepat belanja APBD dengan melibatkan pelaku usaha lokal, termasuk UMKM. Demikian juga program berbasis infrastruktur padat karya akan terus dioptimalkan agar lebih banyak pekerja yang mau berpartisipasi. Terakhir, strategi ketiga, memfasilitasi kerjasama perusahaan besar dan investor untuk bekerjasama dengan usaha kecil dan menengah di Kota Pahlawan.

Upaya Pemkot Surabaya untuk memperkuat program padat karya sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang mengimbau seluruh pimpinan daerah untuk meningkatkan program dengan menggunakan banyak tenaga kerja.

Wujud nyata dari pemerintah dalam merespon masalah tersebut ialah dengan membuat suatu kebijakan. Kebijakan adalah suatu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dimana tujuannya untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi masalah

kemiskinan yaitu dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 119 Tahun 2022 mengenai Penyelenggaraan Program Padat Karya Pada Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum.

Menurut Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 119 Tahun 2022, program padat karya merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk keluarga miskin yang produktif berdasarkan pemanfaatan SDA (sumber daya alam), teknologi, dan juga tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Tujuan dari peraturan tersebut ialah untuk memulihkan perekonomian dan juga mempercepat dalam menaggulangi kemiskinan serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi keluarga miskin.

Bagi Cak Eri (Walikota Surabaya), program padat karya ini tujuan akhirnya adalah mengentaskan kemiskinan di Kota Surabaya. Makanya, saat mengembangkan padat karya itu, Cak Eri meminta semua pihak meninggalkan ego sektoral, tapi harus memiliki kebersamaan dan gotong royong, sehingga ekonomi kerakyatan setempat bisa digerakkan. Cak Eri bersyukur program padat karya ini sudah menjadi percontohan nasional untuk mengentas kemiskinan ([bpkad.surabaya.co.id](http://bpkad.surabaya.co.id)).

Dilihat dari pernyataan Wali Kota Surabaya sendiri Bapak Eri Cahyadi mengenai program rumah padat karya ini, beliau yakin akan dampak yang dihasilkan nantinya, yaitu pada kesejahteraan masyarakat. Namun perlu diingat semua program itu pasti ada faktor pendukung dan penghambat disetiap prosesnya. Maka dari itu penulis akan menganalisis bagaimana evaluasi kebijakan pada salah satu program padat karya di Kecamatan Gubeng Surabaya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang - orang atau perilaku yang diamati (Moleong, dalam Murdiyanto, 2020:28). Dalam model pendekatan ini, peneliti merupakan instrumen utama yang mengamati secara langsung semua tingkah laku manusia yang menjadi objek penelitian, kemudian mendeskripsikan secara jelas dan mendetail mengenai situasi pengamatan yang diamati sebagaimana adanya.

Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moelong, 2017). Penelitian deskriptif menurut Narbuko (2015:44) merupakan penelitian yang berusaha untuk menjelaskan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data dengan menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikannya.

Penelitian kualitatif dirasa sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan, karena penelitian ini sangat memberikan kesempatan yang luas kepada peneliti untuk memfokuskan ke dalam permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dengan teknik Pendekatan wawancara dan pengumpulan data terkait Evaluasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Rumah Padat Karya (Studi di Viaduct by Gubeng). Dalam penelitian kali ini fokus yang akan diterapkan yaitu bagaimana Evaluasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 119

Tahun 2022 Tentang Kebijakan Rumah Padat Karya (Studi di Viaduct by Gubeng) bisa berkembang hingga saat ini. Disini peneliti akan menggunakan kriteria dimensi evaluasi kebijakan publik untuk

mengevaluasi sebuah pelaksanaan Program Rumah Padat Karya Viaduct by Gubeng menurut William Dunn (2003:429-438) yaitu, Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan, Responsivitas dan Ketepatan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis harus menjelaskan hasil penelitian (apa yang ditemukan) secara rinci. Bagian hasil penelitian dan diskusi berisi hasil temuan penelitian dan analisis. Temuan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan harus ditulis dengan dukungan tambahan dari data yang memadai. Hasil dan analisis penelitian harus dapat menyelesaikan atau memberikan penjelasan untuk pertanyaan yang dinyatakan dalam pendahuluan. (12pt, 1.15 lines spacing).

Sesuai teori implementasi yang di Menurut George C. Edward III (dalam Abdul Adim, 2020), bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu : 1. Komunikasi Untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan publik diperlukan komunikasi yang baik antara implementor dengan yang menjadi sasaran, dengan adanya komunikasi yang baik antara kedua pihak tersebut informasi semakin jelas, maka akan tercipta konsistensi dari para implementor dalam menjalankan setiap kebijakan yang akan dilaksanakan di masyarakat. 2. Sumber daya Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Selain sumber daya manusia, terdapat sumber daya finansial dan waktu yang dapat menjadi hal penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. 3. Disposisi, disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. 4. Struktur

Birokrasi, struktur birokrasi sangat penting karena implementasi bisa jadi masih belum efektif karena ketidak-efisienan dan tidak efektifnya struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Berdasarkan dengan penelitian diatas yang terdiri dari fokus Evaluasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Rumah Padat Karya dengan dimensi yang telah dijelaskan dan mengacu pada teori William Dunn (2003:429-438) bisa dikatakan belum sepenuhnya bisa mengatasi kemiskinan yang ada di Kecamatan Gubeng, karena Viaduct by Gubeng sendiri hanya menampung 10 karyawan saja dari berbagai kelurahan di Kecamatan Gubeng. Program Rumah Padat Karya ini adalah terobosan baru dari Pemerintah Kota Surabaya yang digunakan untuk penanganan kemiskinan di Kota Surabaya salah satunya yaitu Viaductby Gubeng yang dikhususkan untuk menangani kemiskinan di Kecamatan Gubeng.

Menurut William Dunn (2003:429-438) ada beberapa indikator untuk mengevaluasi sebuah program:

### 1. Efisiensi

Efisiensi dari Evaluasi adanya Program Rumah Padat Karya Viaduct by Gubeng ini belum bisa dikatakan efisien karena dengan usaha Pemerintah Kota Surabaya untuk membiayai Viaduct by Gubeng sampai bisa berdiri seperti sekarang tidak sepenuhnya mengentaskan kemiskinan yang ada di Kecamatan Gubeng, karena yang bekerja disana hanya ada 10 orang saja. Meskipun hanya 10 orang tetapi mereka semua termasuk dalam kategori keluarga miskin (Gamis) yang sesuai dengan data.

Jika dilihat dari usaha untuk mengembangkan Viaduct by Gubeng ini

sudah bisa dikatakan efisien karena dari Bapak Camat Gubeng sendiri merekrut pendamping untuk mengawasi, membimbing dan juga mengarahkan para karyawan yang bekerja disana. Karena tidak memungkinkan jika mereka dilepas sendiri begitu saja mengingat mereka dari masyarakat yang kurang mampu jadi secara mental dan cara berfikirnya masih kurang dan belum begitu luas

### 2. Kecukupan

Program Rumah Padat Karya melalui Viaduct by Gubeng ini sudah berjalan satutahun lebih yang sudah beroperasi sejak bulan Mei 2022 tahun lalu. Dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya Viaduct by Gubeng ini sudah sangat layak dijadikan ladang pekerjaan khususnya bagi keluarga miskin (Gamis).

Viaduct by Gubeng menjadi salah satu Program Kebijakan yang cukup untuk mengurangi kemiskinan walaupun belum bisa dikatakan sepenuhnya. Karena tidak memungkinkan jika keluarga miskin tersebut ditampung di Viaduct by Gubeng, setiap instansi kerja selalu mempunyai kapasitas maksimal untuk jumlah karyawannya. Disana hanya ada 10 karyawan yang bekerja dan mereka semua termasuk keluarga miskin dan ada 3 pendamping yang bisa membimbing, mengarahkan dan juga mengawasi secara langsung di Viaduct by Gubeng. Para karyawan yang bekerja disana juga tidak diberi pelatihan khusus, hanya saja mereka dibimbing oleh pendamping sesuai dengan divisinya masing-masing.

Selama proses pengembangan Viaduct by Gubeng masyarakat Kecamatan Gubeng yang kurang antusias dengan adanya Program Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya ini. Masyarakat Kecamatan Gubeng lebih memilih berada pada zona

nyaman contohnya mereka tetap memilih menjadi seorang pengamen dan tukang parkir.

### **3. Kesamaan**

Dari awal berdiri di Tahun 2022 Viaduct by Gubeng ini sudah dijalankan secara maksimal. Sampai dengan pendataan semua aset-aset dan juga penataan sistem manajemen yang sekarang bisa dikatakan sudah tertata dengan baik.

Viaduct by Gubeng juga sudah banyak mengalami perkembangan tidak hanya sebagai kafe dan resto saja. Di sana juga sudah ada barbershop yang sudah mulai beroperasi, untuk karyawan yang bekerja juga dari keluarga miskin (Gamis) yang sudah mengikuti pelatihan bersertifikat yang diadakan oleh Disnaker Kota Surabaya beberapa bulan yang lalu. Selain itu ada juga tempat kursus menjahit untuk ibu-ibu yang memproduksi semacam tas belanja dan kelompok ibu-ibu tersebut juga diambil dari keluarga miskin (Gamis). Uniknya Viaduct by Gubeng juga akan memproduksi makanan dan minuman yang akan dijual di gerobak-gerobak dan akan dipasarkan oleh masyarakat kurang mampu yang masuk dalam data keluarga miskin (Gamis) ekstrim yang ada Di Kecamatan Gubeng. Viaduct by Gubeng juga tidak mempunyai ketentuan-ketentuan khusus secara pendidikan untuk para karyawannya. Cukup dengan dibuktikan bahwa mereka adalah masyarakat dari Kecamatan Gubeng dan juga termasuk dalam kategori keluarga miskin (Gamis) ekstrim.

### **4. Responsivity**

Pemerintah Kota Surabaya juga sangat mendukung sehingga memberikan saran dan prasarana yang baik untuk Viaduct by Gubeng. Tetapi sayangnya Viaduct by Gubeng belum sepenuhnya mendapat perhatian oleh jajaran Pemerintah Kota Surabaya sendiri, Viaduct by Gubeng belum dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Pemerintahan.

Harapan dari HRD Viaduct by Gubeng sendiri adalah mungkin setelah ini Viaduct by Gubeng bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan Pemerintahan seperti contohnya memesan makan dan minuman dalam kegiatan yang diadakan dari Viaduct by Gubeng. Selain itu juga bisa menggunakan Viaduct by Gubeng untuk mengadakan rapat dengan orang-orang Pemerintahan. Dengan begitu maka Viaduct by Gubeng ini bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat Kota Surabaya. Karena Viaduct by Gubeng adalah satu-satunya Rumah Padat Karya kebanggaan Kota Surabaya.

### **5. Ketepatan**

Program Rumah Padat Karya Viaduct by Gubeng ini sudah didirikan sesuai dengan tujuan awal Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya. Para karyawan yang bekerja disana adalah masyarakat dari Kecamatan Gubeng yang memang sudah masuk dalam data keluarga miskin (Gamis) ekstrim. Sasaran tersebut dipilih karena Pemerintah Kota Surabaya masih menjumpai banyak sekali keluarga kurang mampu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka secara optimal.

Adapun faktor pendukung dan penghambat mempengaruhi sehingga sebuah program bisa berjalan sampai dengan saat ini. Faktor pendukungnya yaitu adanya dukungan dari Pemerintah Kota Surabaya dan juga Bapak Camat Gubeng sendiri yang mendukung penuh supaya Viaduct by Gubeng bisa berdiri seperti sekarang ini. Dengan fasilitas juga sarana dan prasarana yang diberikan selama dari awal proses Viaduct by Gubeng didirikan sampai dengan pemberian pendamping untuk para karyawan yang bekerja disana. Faktor penghambatnya adalah dari SDM nya sendiri, untuk menjalankan sebuah program kebijakan justru paling penting adalah semangat dari para SDM nya. Pernyataan dari hasil

wawancara menyimpulkan masyarakat Kecamatan Gubeng kurang bersemangat dan tertarik dengan adanya Program Kebijakan Rumah Padat Karya melalui Viaduct by Gubeng.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang sudah tersaji sebelumnya, sehingga bisa diambil Evaluasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Rumah Padat Karya (Studi di Viaduct by Gubeng), yaitu belum bisa dikatakan efisien karena biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya untuk membangun Viaduct by Gubeng tidak bisa sepenuhnya mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Gubeng. Mereka lebih memilih untuk bertahan dengan pekerjaan mereka pada saat ini contohnya sebagai pengamen, tukang parkir dan juga pengemis. Padahal dengan adanya Program Pemerintah Kota Surabaya ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kelayakan hidup dengan harapan supaya mereka bisa hidup jauh lebih baik untuk diri mereka sendiri.

## REFERENSI

- Devi, T.M. (2018). *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Program Padat Karya Tunai Di Kecamatan Magelang Utara*, JMAN Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara, 2 (2), 84-96. Diakses dari <https://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/338>
- Dianita, M. (2022). *Evaluasi Penerapan Program Padat Karya Tunai Desa (PTKD) di Desa Cilamaya Tahun 2021*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Diakses dari <https://etheses.uinsgd.ac.id/53820/>
- Imel, I. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Melalui Program Padat Karya Tunai Di Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram*

*Bagian Barat Provinsi Maluku*, IPDN Jatinagor.

- Muhammad, Y.A.S., dan Suci, M. (2022). *Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*, Publika, 665- 680. Diakses dari <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/45583>

Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Padat Karya Pada Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum.

- Riska F., dan Burhanuddin. (2022). *Evaluasi Program Kebijakan Bantuan Sosial Di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu*, Journal I La Galigo : Public Administration Journal, Volume 5 Nomor 2. Diakses dari <http://ojs.unanda.ac.id/index.php/ilgaligo/article/view/1621/834>

Santika. (2022). *Evaluasi Program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu*. Skripsi. Universitas Islam Riau.

- Yuliana, Y, 2022, *Impementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Padat Karya pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional*, Kaganga : Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humoniora 5 (1), 100-111. Diakses dari <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/KAGANGA/article/view/3580>